

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hubungan antara Indonesia dengan Jepang memiliki sejarah yang cukup panjang. Hubungan ini berawal pada tahun 1942 untuk pertama kalinya Jepang menginjakkan kaki di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan Jepang, penjajahan yang cukup kejam dilakukan oleh Jepang ini memberikan trauma yang mendalam bagi Indonesia. Jepang berupaya untuk membayar sejarah kelam yang telah dilakukannya akibat penjajahan di masa lalu kepada Indonesia dengan memberikan bantuan ODA (Official Development Assistance). Pada saat itu bertepatan dengan munculnya Jepang sebagai negara raksasa ekonomi, Jepang berupaya untuk menjual produk dalam negerinya ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dan melakukan investasi dengan nominal yang cukup besar ke berbagai perusahaan di kawasan ASEAN. Namun, investasi besar-besaran ini seiring berjalannya waktu justru malah menimbulkan konflik bagi Jepang dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan ASEAN ini menyerukan demo anti-Jepang yang dilatarbelakangi karena adanya dominasi terhadap produk Jepang di pasar lokal.

Di Indonesia sendiri fenomena tersebut dikenal sebagai Peristiwa Malari, peristiwa ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Tanaka Kakuei ke Indonesia pada 15 Januari 1974, demonstrasi ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena khawatir akan dijajah kembali oleh Jepang karena pasar perekonomian Indonesia saat itu dikuasai oleh produk dari Jepang dan mematikan UMKM lokal. Konflik Malari ini berbuntut hingga terjadinya kerenggangan hubungan antara Indonesia dengan Jepang, hal ini akhirnya menginisiasi PM Takeo Fukuda mengeluarkan sebuah doktrin baru bernama Doktrin Fukuda pada tahun 1977. Doktrin ini berisi mengenai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri Jepang terhadap negara - negara di kawasan Asia Tenggara dan salah satunya adalah Indonesia. Pedoman tersebut sebagai komitmen bagi Jepang terhadap negara

di kawasan ASEAN dalam melakukan diplomasinya yang dikenal sebagai heart to heart diplomacy.

Hadirnya Doktrin Fukuda ini menjadi awal bagi Jepang untuk melakukan diplomasi publiknya dengan tujuan untuk memperbaiki citra negaranya yang dipandang buruk oleh masyarakat di kawasan ASEAN khususnya di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan menggunakan bidang sosial dan kebudayaan. kedua negara memiliki kesamaan yaitu menjunjung tinggi nilai sosial dan budaya dan adanya ketertarikan antara kedua negara satu sama lain. Dalam menjalankan diplomasi publiknya, Jepang membangun sebuah lembaga yang bertugas sebagai representasi Jepang di berbagai negara dalam mewadahi pertukaran budaya yang disebut sebagai The Japan Foundation. Di Indonesia sendiri Japan Foundation berdiri pada tahun 1979 dibawah naungan Kementrian Luar Negeri Jepang (MOFA) yang ada di Indonesia, dengan tujuan awal untuk membendung sikap anti Jepang yang menyebar di kalangan masyarakat Indonesia dan sebagai upaya memperbaiki citra Jepang setelah peristiwa malari.

Japan Foundation di Indonesia adalah untuk mengadakan pertukaran budaya antara Jepang dan Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan partisipasi pada lingkup internasional yang lebih baik, serta memelihara dan mengembangkan hubungan luar negeri Jepang yang harmonis. Dalam rangka meningkatkan citra positif Jepang di kalangan masyarakat Indonesia, pemerintah Jepang melalui Japan Foundation Jakarta melakukan serangkaian diplomasi publik yang dapat dilihat dari tiga dimensi diplomasi publik yaitu News Management, Strategic Communication, dan Relationship Building.

Diplomasi publik merupakan bentuk diplomasi bagi suatu negara terhadap negara lain atau publik dengan tujuan menarik pandangan mengenai kebudayaan negaranya melalui pendekatan yang lebih halus. Mark Leonard Mendefinisikan bahwa diplomasi publik merupakan sebuah fenomena sebuah hubungan antara image dan issue. Isu-isu yang terjadi di negara tentu akan terus berkembang dan dapat berpengaruh terhadap

hubungan negara dengan lingkungan domestik maupun internasional (Leonard, 2002). Dengan hadirnya diplomasi publik dapat mengubah isu-isu tersebut menjadi sebuah image atau citra positif melalui agenda diplomasi publik, dengan kata lain diplomasi publik merupakan sebuah alat yang memiliki peran penting dalam pembentukan sebuah image suatu negara atas isu yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan citra positif Jepang di kalangan masyarakat Indonesia, pemerintah Jepang melalui Japan Foundation Jakarta melakukan serangkaian diplomasi publik yang dapat dilihat dari tiga dimensi diplomasi publik Mark Leonard (2002), yaitu News Management, Strategic Communication, dan Relationship Building.

Pada dimensi pertama yakni News Management, terlihat bahwa adanya penyebaran informasi dan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Japan Foundation. Pada dimensi pertama ini Japan Foundation Jakarta memanfaatkan website dan sosial media dalam menyebarkan informasinya kepada publik, media sosial tersebut digunakan oleh The Japan Foundation melakukan diskusi terkait kegiatan mereka di Indonesia dan memiliki akun resmi media sosial yang menarik. Dengan melihat jumlah pengikut, komentar, dan tautan yang dicantumkan di setiap media sosialnya, tampak bahwa Jepang mendapat kesan positif di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat Indonesia terhadap acara yang akan digelar dan tidak adanya opini negatif di media sosial The Japan Foundation.

Selanjutnya pada dimensi diplomasi publik yang kedua yakni Strategic Communication, terlihat bahwa adanya strategi yang dijalankan oleh Japan Foundation Jakarta dengan membuat sebuah agenda seperti Japanscope dan Japan Festival Film, selain itu Japan Foundation Jakarta juga berupaya melakukan strategi komunikasinya dengan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai aktor seperti influencer maupun lembaga pendidikan dan kesenian. Upaya - upaya yang dijalankan oleh Japan Foundation ini tentu saja tidak terlepas dari menanamkan branding Jepang dikalangan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kekayaan

intelektualnya dan mempromosikan Jepang sebagai negara yang berorientasi pada kebudayaan.

Pada dimensi terakhir yakni *Relationship Building*, Japan Foundation Jakarta pada dimensi ini banyak melakukan kegiatan dengan melakukan kerja sama tidak hanya dengan masyarakat Indonesia atau lembaga lain saja, namun juga berupaya melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia guna membangun hubungan jangka panjang yang dapat memberikan keuntungan dan timbal balik bagi kedua negara. Dalam dimensi ini Japan Foundation Jakarta sebagai wadah dalam memberikan informasi seputar beasiswa atau studi di Jepang bagi pelajar Indonesia, mewadahi adanya pelatihan bahasa Jepang bagi masyarakat Indonesia, selain itu adanya acara seminar, konferensi, dan festival ini menjadi upaya yang dilakukan Japan Foundation dalam melakukan diplomasi publiknya. Dengan pembangunan hubungan ini melalui berbagai kegiatannya akan mempermudah publik Indonesia untuk memahami dan mengenal budaya Jepang.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai upaya diplomasi publik yang dijalankan oleh pemerintah Jepang melalui Japan Foundation Jakarta yang dianalisis menggunakan tiga dimensi diplomasi publik menurut Mark Leonard, menurut penulis Japan Foundation telah melakukan upaya diplomasi publiknya melalui ketiga dimensi tersebut mulai dari pengelolaan berita dengan menyebarkan isu atau informasi kepada publik melalui website resmi, sosial media, maupun melalui media cetak seperti flyer. Upaya selanjutnya melalui dimensi komunikasi strategis Japan Foundation Jakarta melakukan berbagai upaya untuk merencanakan dan menetapkan sebuah strategi untuk mempromosikan negara Jepang. Dan upaya terakhir yang dilakukan oleh Japan Foundation Jakarta melalui dimensi pembangunan hubungan adalah dengan mensosialisasikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia, menumbuhkan rasa pengertian terhadap budaya melalui event - event pertukaran budaya, dan terjalinnya hubungan yang nyata dan virtual antara kedua negara.

6.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya dapat diberikan saran untuk diplomasi publik Jepang agar dapat terlaksana lebih baik. Terdapat dua saran, yaitu saran praktis dan saran teoritis.

6.2.1. Saran Praktis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran agar Japan Foundation Jakarta selaku lembaga representasi pemerintah Jepang di Indonesia dapat terus mempertahankan program-program diplomasi publiknya dan dapat menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Walaupun pada praktiknya diplomasi publik yang dijalankan oleh Japan Foundation Jakarta telah berhasil, saran penulis selanjutnya adalah Japan Foundation Jakarta harus dapat mempertahankan maupun meningkatkan minat serta antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan Japan Foundation Jakarta dapat terus meningkatkan dan memberikan inovasi kedepannya terhadap program-program diplomasi publiknya seperti adanya penambahan program baru yang melibatkan banyak masyarakat Indonesia, menambah banyak pojok *koryu space* di beberapa kota lain di Indonesia, dan melakukan banyak kerjasama (MoU) dengan pihak pemerintah, media lokal, maupun entitas bisnis agar dapat terus meningkatkan citra positif Jepang di Indonesia.

6.2.2. Saran Teoritis

Penelitian ini tidak menganalisis mengenai dampak yang dirasakan bagi Jepang dan Indonesia terhadap implementasi diplomasi publik yang dijalankan oleh Japan Foundation Jakarta melalui tiga dimensi diplomasi publik Mark Leonard secara khusus dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki penulis dimana data yang di diperoleh peneliti lebih memfokuskan pada upaya - upaya yang dilakukan oleh Japan Foundation Jakarta. Mengingat penelitian ini membahas dari segi negara Jepang dengan negara Indonesia, saran penulis untuk penelitian selanjutnya, alangkah lebih baik

jika penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada segi negara Jepang dengan negara lain secara spesifik dengan menggunakan teori diplomasi publik yang lain, yaitu teori diplomasi Publik Nicholas J. Cull yang dapat dianalisis menggunakan enam indikator lainnya agar dapat membahas lebih dalam. Selain itu, saran lain dari penulis untuk penelitian selanjutnya adalah dengan memfokuskan penelitian pada interaksi negosiasi kerja sama Japan Foundation dengan aktor Non-Negara, hal ini dikarenakan pada penelitian ini penulis memiliki kendala terkait limitasi data yang penulis dapatkan sehingga untuk penelitian selanjutnya di harapkan dapat mencari lebih banyak narasumber untuk memperkaya data penelitian. Penulis juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan metode penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif, hal ini agar selain dapat menjelaskan interaksi negosiasi diplomasi namun juga dapat mengukur efektivitas dari adanya diplomasi publik tersebut.